

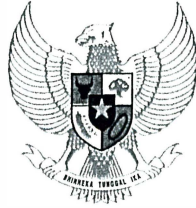
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERMOHONAN IZIN PENILAI PUBLIK

- A. Surat Permohonan Izin Penilai Publik.
- B. Formulir Permohonan Izin Penilai Publik.
- C. Daftar Pengalaman Kerja di Bidang Penilaian.
- D. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.
- E. Daftar Kegiatan Pendidikan Profesional Lanjutan.

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Izin Penilai Publik

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Izin Penilai Publik

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa
Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana/Penilaian Properti/Penilaian Bisnis/Penilaian Properti dan Bisnis*).

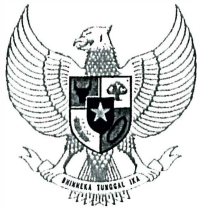
Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

**) Coret yang tidak sesuai.*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Formulir Permohonan Izin Penilai Publik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENILAI PUBLIK	
Klasifikasi Izin Penilai Publik yang Dimohonkan: ☐ Penilai Properti Sederhana ☐ Penilai Properti ☐ Penilai Bisnis ☐ Penilai Properti dan Bisnis	
I. Informasi Pemohon Izin	
1. Nama Lengkap	:
2. Nomor Induk Kependudukan	:
3. Tempat dan Tanggal Lahir	
Tempat Lahir	:
Tanggal Lahir	: - -
	tgl bln thn
4. Alamat Tempat Tinggal	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
5. Telepon Rumah	: -
6. Handphone	:
7. E-mail	:
8. Nomor Pokok Wajib Pajak	: . . . - .
9. Keanggotaan Asosiasi	: Nomor :
	Berlaku s.d. : - -
	tgl bln thn
II. Informasi Pendidikan Pemohon Izin	
1. Jurusan	:
2. Fakultas	:
3. Universitas/Perguruan Tinggi	:
	Kota :
4. Tanggal Kelulusan	: - -
	tgl bln thn
5. Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Penilai	: Nomor :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

III. Informasi Pengalaman Kerja di Bidang Penilaian

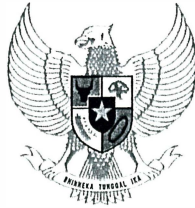
1. Nama KJPP	:	
2. Izin Usaha KJPP	:	
	:	KMK No. :
	:	Tanggal : - -
		tgl bln thn
3. Jabatan Terakhir pada KJPP	:	
4. Pengalaman Kerja	:	thn s.d. thn
a. Sebagai Penilai	:	jam thn s.d. thn
b. Sebagai Penyelia/Ketua Tim	:	jam thn s.d. thn
5. Pekerjaan/ Jabatan Lainnya selain di KJPP	:	
6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari KJPP	:	Nomor :
	:	Tanggal : - -
		tgl bln thn

Pemohon,

(.....)

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- ☐ Surat Permohonan (Lampiran I.A))
- ☐ Daftar Pengalaman Penilaian (Lampiran I.C)
- ☐ Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran I.D)
- ☐ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti domisili lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- ☐ Fotokopi ijazah
- ☐ Fotokopi tanda lulus Ujian Sertifikasi Penilai sesuai dengan permohonan izin yang diajukan
- ☐ Daftar Kegiatan PPL dalam 2 tahun terakhir apabila tanggal kelulusan USP telah melewati masa 2 tahun, paling sedikit 20 SKP bagi permohonan izin Penilai Properti Sederhana, atau 40 SKP bagi permohonan izin Penilai Properti dan/atau Bisnis, yang disertai dengan fotokopi sertifikat PPL (Lampiran I.E)
- ☐ Fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai Publik yang masih berlaku atau surat keterangan keanggotaan dari Asosiasi Profesi Penilai Publik
- ☐ Surat keterangan pengalaman kerja dari Pemimpin/Pemimpin Rekan/Rekan KJPP yang bersangkutan bekerja
- ☐ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
- ☐ 2 (dua) lembar foto ukuran 4x6, berwarna dan berlatar belakang merah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

D. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin Penilai Publik adalah benar, dan saya tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Penilai Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi pencabutan izin Penilai Publik serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

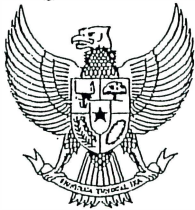
.....

Yang membuat pernyataan,

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

E. Daftar Kegiatan Pendidikan Profesional Lanjutan

Daftar Kegiatan PPL Bagi Pemohon yang Telah Lulus USP Lebih dari 2 (Dua) Tahun					
No.	Judul PPL	Kegiatan PPL			SKP
		Tanggal	Tempat	Penyelenggara	
Jumlah SKP					

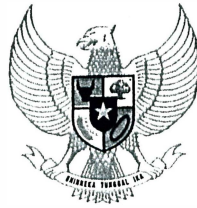
Daftar kegiatan PPL wajib dilampirkan dengan fotokopi sertifikat PPL.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BIRO UMUM
GIARTO
NIP 195904201984021001

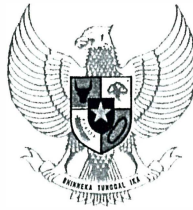


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

PERMOHONAN PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA PENILAI PUBLIK
UNTUK SEMENTARA WAKTU

- A. Surat Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu.
- B. Formulir Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu.
- C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik
Untuk Sementara Waktu

Yth. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa
Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu.

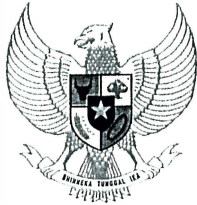
Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

(.....)
Nomor Izin:

h



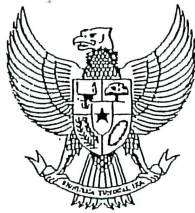
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Formulir Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA UNTUK SEMENTARA WAKTU	
I. Informasi Penilai Publik	
1. Nama Lengkap	:
2. Alamat Tempat Tinggal	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
3. Telepon	: -
4. Alamat selama masa penghentian pemberian jasa	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Negara :
	Kode Pos :
5. Izin Penilai Publik	: Nomor : . .
	KMK No. :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn
II. Informasi KJPP (jika ada)	
Hanya diisi jika Penilai Publik yang bersangkutan memiliki KJPP saat mengajukan permohonan	
1. Nama KJPP	:
2. Izin Usaha KJPP	: . .
	KMK No. :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn
3. Kedudukan pada KJPP sebagai	: ☐ Pemimpin ☐ Pemimpin Rekan ☐ Rekan

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)

Nomor Izin:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

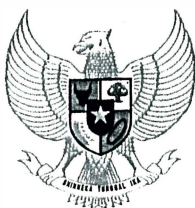
KEPALA BAGIAN T U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 1959042019840031001



b



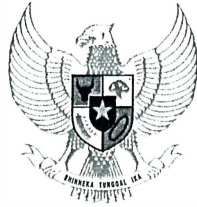
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

PERMOHONAN PEMBERIAN JASA KEMBALI SEBELUM BERAKHIRNYA
MASA PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA PENILAI PUBLIK
UNTUK SEMENTARA WAKTU

- A. Surat Permohonan Pemberian Jasa Kembali.
- B. Formulir Permohonan Pemberian Jasa Kembali.
- C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Pemberian Jasa Kembali

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pemberian Jasa Kembali Sebelum Berakhirnya
Masa Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk
Sementara Waktu

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan pemberian jasa kembali sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu.

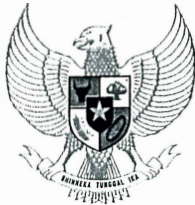
Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

(.....)
Nomor Izin:

h



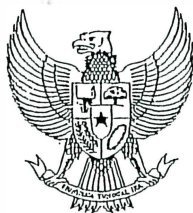
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Formulir Permohonan Pemberian Jasa Kembali

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN PEMBERIAN JASA KEMBALI SEBELUM BERAKHIRNYA MASA PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA UNTUK SEMENTARA WAKTU	
I. Informasi Penilai Publik	
1. Nama Lengkap	:
2. Alamat Tempat Tinggal	: RT/RW : / Kelurahan : Kecamatan : Kota : Provinsi : Kode Pos :
3. Telepon/ <i>Handphone</i>	: -
4. Izin Penilai Publik	: Nomor : . . KMK No. : Tanggal : - - tgl bln thn
II. Informasi KJPP (jika ada)	
1. Nama KJPP	:
2. Izin Usaha KJPP	: . . KMK No. : Tanggal : - - tgl bln thn
3. Kedudukan pada KJPP sebagai	: ☐ Pemimpin ☐ Pemimpin Rekan ☐ Rekan
III. Surat Persetujuan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu	
1. Surat Persetujuan	: Nomor : Tanggal : - - tgl bln thn
2. Jangka Waktu	: Tahun Bulan
3. Tanggal Berakhir	: - - tgl bln thn
Penilai Publik, (.....) Nomor Izin:	
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini : ☐ Surat Permohonan (Lampiran III.A) ☐ Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran III.C) ☐ Fotokopi sertifikat telah mengikuti PPL selama 1 (satu) tahun terakhir ☐ Fotokopi KTP atau bukti domisili lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ☐ Fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai yang masih berlaku	

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan pemberian jasa kembali sebelum berakhirnya masa penghentian pemberian jasa Penilai Publik untuk sementara waktu adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)

Nomor Izin:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

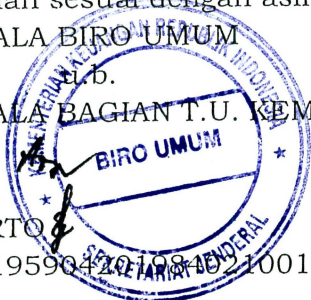
MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

l.b.

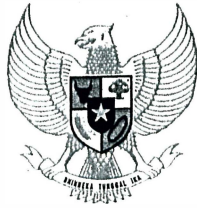
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201981021001

b

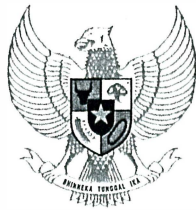


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI PENILAI PUBLIK

- A. Surat Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik.
- B. Formulir Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik.
- C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Penilai Publik.

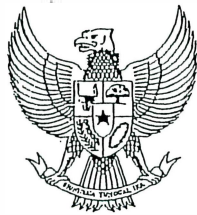
Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

(.....)
Nomor Izin:

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai Penilai Publik, dan bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan pengunduran diri Penilai Publik adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)

Nomor Izin:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



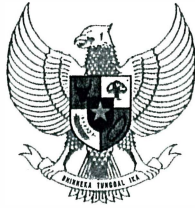
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

PERMOHONAN IZIN USAHA KJPP

- A. Surat Permohonan Izin Usaha KJPP.
- B. Formulir Permohonan Izin Usaha KJPP.
- C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Izin Usaha KJPP

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Izin Usaha KJPP

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha KJPP berbentuk badan usaha Perseorangan/Persekutuan Perdata/Firma*).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin/Pemimpin Rekan*)
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

*) Coret yang tidak sesuai.

2



Dalam hal Rekan KJPP lebih dari 1 (satu) orang, informasi Rekan KJPP dibuat di lembar terpisah.

- | | | Penilai Publik | Non Penilai Publik |
|------------------------------|--------------|---|--------------------|
| 1. Jumlah Rekan KJPP | | | |
| 2. Perjanjian Kerja Sama | : Nomor | | |
| | Tanggal | <div></div> - <div></div> - <div></div>
<small>tgl bln thn</small> | |
| 3. Nama Rekan | : | | |
| 4. Nomor Induk Kependudukan | : | | |
| 5. Alamat Tempat Tinggal | : | | |
| | RT/RW | : <div></div> / <div></div> | |
| | Kelurahan | : | |
| | Kecamatan | : | |
| | Kota | : | |
| | Provinsi | : | |
| | Kode Pos | : | |
| 6. Telepon/ <i>Handphone</i> | : | <div></div> - <div></div> | |
| 7. <i>E-mail</i> | : | | |
| 8. Izin Penilai Publik | : Nomor | <div></div> . <div></div> . <div></div> | |
| | KMK No. | : | |
| | Tanggal | <div></div> - <div></div> - <div></div>
<small>tgl bln thn</small> | |
| 9. Keanggotaan Asosiasi | : Nomor | | |
| | Berlaku s.d. | <div></div> - <div></div> - <div></div>
<small>tgl bln thn</small> | |

1. Jumlah Pegawai Tetap : orang

2. Pendidikan Pegawai Tetap : orang DIII, lulus pendidikan dasar penilaian: orang
 orang S1, lulus pendidikan dasar penilaian: orang
 orang berpendidikan lainnya

Pemimpin/Pemimpin Rekan*)
KJPP.....

(.....)
Nomor Izin:

**) Coret yang tidak sesuai*

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

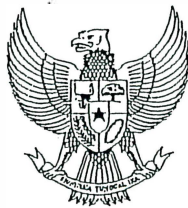
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- ☐ Surat Permohonan (Lampiran V.A))
- ☐ Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran V.C)
- ☐ Fotokopi surat izin Penilai Publik Pemimpin KJPP
- ☐ Fotokopi KTP Pemimpin KJPP atau bukti domisili lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- ☐ Daftar pegawai tetap dan fotokopi KTP-nya
- ☐ Fotokopi ijazah dan surat tanda lulus pendidikan dasar penilaian pegawai tetap
- ☐ Surat pengangkatan pegawai tetap KJPP
- ☐ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP
- ☐ Fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai bagi Pemimpin KJPP
- ☐ Fotokopi tanda bukti domisili usaha
- ☐ Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan KJPP
- ☐ Foto tampak depan dan ruangan kantor KJPP
- ☐ Dokumen sistem pangkalan data Penilaian
- ☐ Dokumen Sistem Pengendalian Mutu

Bagi Permohonan Izin KJPP Berbentuk Persekutuan Perdata atau Firma, ditambahkan:

- ☐ Fotokopi surat izin Penilai Publik seluruh Rekan KJPP
- ☐ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seluruh Rekan KJPP
- ☐ Fotokopi akta perjanjian kerjasama KJPP yang disahkan oleh notaris
- ☐ Fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai seluruh Rekan KJPP

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin usaha KJPP yang berbentuk badan usaha Perseorangan/Persekutuan Perdata/Firma*) adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi pencabutan izin KJPP serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,
Pemimpin/Pemimpin Rekan*)
KJPP

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)
Nomor Izin:

*) Coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAKOR U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

LAPORAN TENAGA AHLI ASING

- A. Surat Laporan Tenaga Ahli Asing.
- B. Formulir Laporan Tenaga Ahli Asing.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

A. Surat Laporan Tenaga Ahli Asing

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Tenaga Ahli Asing

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan laporan mempekerjakan/memberhentikan*) tenaga ahli asing pada KJPP

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Laporan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin/Pemimpin Rekan*),
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Formulir Laporan Tenaga Ahli Asing

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR LAPORAN TENAGA AHLI ASING	
I. Informasi KJPP	
1. Nama KJPP	:
2. Alamat KJPP	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
3. Izin Usaha KJPP	: . .
	KMK No. :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn
II. Informasi Tenaga Ahli Asing yang Dipekerjakan/Diberhentikan*) <i>Dalam hal jumlah tenaga ahli asing lebih dari 1 (satu) orang, informasi dibuat di lembar terpisah</i>	
1. Nama Tenaga Ahli (tanpa gelar)	:
2. Tempat Lahir	:
Tanggal Lahir	: - -
	tgl bln thn
3. Nomor Identitas	:
4. Kewarganegaraan	:
5. Alamat Tempat Tinggal di Indonesia	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
6. Nomor Izin Kerja Tenaga Asing	:
	- -
	tgl bln thn

d



- 4 -

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

h



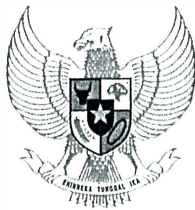
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN CABANG KJPP

- A. Surat Permohonan Izin Pembukaan Cabang KJPP.
- B. Formulir Permohonan Izin Pembukaan Cabang KJPP.
- C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Izin Pembukaan Cabang KJPP

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Izin Pembukaan Cabang
KJPP di provinsi

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Cabang KJPP di provinsi

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

h



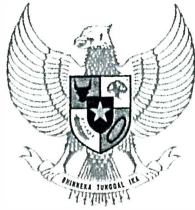
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Formulir Permohonan Izin Pembukaan Cabang KJPP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN CABANG KJPP	
I. Informasi Pemimpin Cabang KJPP	
1. Nama Lengkap	:
2. Alamat Tempat Tinggal	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
3. Telepon/ <i>Handphone</i>	: -
4. <i>E-mail</i>	:
5. Izin Penilai Publik	: Nomor : . .
	KMK No. :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn
6. Surat Penunjukan Sebagai Pemimpin Cabang	: Nomor :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn
II. Informasi KJPP	
1. Nama KJPP	:
2. Izin Usaha KJPP	: . .
	KMK No. :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn
III. Informasi Kantor Cabang KJPP	
1. Alamat Cabang KJPP	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
2. Telepon	: -
3. Faksimile	: -
4. <i>E-mail</i>	: -
5. Status Kantor	: ☐ Milik sendiri ☐ Sewa Luas : m ²

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

IV. Informasi Pegawai Tetap Cabang KJPP

1. Jumlah Pegawai Tetap : orang
2. Pendidikan Pegawai Tetap : orang DIII, lulus pendidikan dasar penilaian: orang
 orang S1, lulus pendidikan dasar penilaian: orang
 orang berpendidikan lainnya

Pemimpin Rekan,
KJPP.....

(.....)
Nomor Izin:

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- Surat Permohonan (Lampiran VII.A)
- Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran VII.C)
- Surat persetujuan dari seluruh Rekan KJPP mengenai penunjukan salah satu Rekan Penilai Publik menjadi Pemimpin Cabang KJPP
- Fotokopi surat izin usaha KJPP
- Fotokopi izin Penilai Publik Pemimpin Cabang
- Fotokopi KTP Pemimpin Cabang atau bukti domisili lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- Daftar pegawai tetap dan fotokopi Kartu Tanda Penduduknya
- Fotokopi ijazah dan surat tanda lulus pendidikan dasar penilaian pegawai tetap
- Surat pengangkatan pegawai tetap Cabang KJPP
- Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan Cabang KJPP
- Fotokopi tanda bukti domisili usaha Cabang KJPP
- Foto tampak depan dan ruangan kantor Cabang KJPP
- Dokumen sistem pangkalan data Penilaian

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

[Kop Surat KJPP]

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam surat permohonan izin pembukaan Cabang KJPP di provinsi adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, bersedia dikenakan sanksi pencabutan izin pembukaan Cabang KJPP serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin Rekan
KJPP

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)
Nomor Izin:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

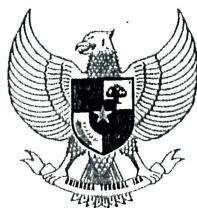
MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





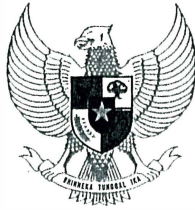
LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN

- A. Surat Permohonan Pembukaan Kantor Perwakilan.
- B. Formulir Permohonan Pembukaan Kantor Perwakilan.
- C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Pembukaan Kantor Perwakilan

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pembukaan Kantor Perwakilan
KJPP di

Yth. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan
dan Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan pembukaan Kantor Perwakilan KJPP di

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin/Pemimpin Rekan *),
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

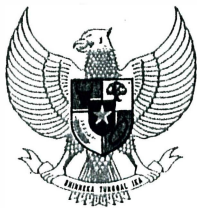
III. Informasi Penanggung Jawab Kantor Perwakilan

1. Nama Lengkap :
2. Alamat Tempat Tinggal :
- RT/RW : /
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- Provinsi :
- Kode Pos :
3. Telepon Rumah : -
4. Handphone : -
5. E-mail :
6. Jenjang Pendidikan : ☐ D-III ☐ S-1 ☐ Lainnya: (sebutkan)
- Fakultas/Jurusan :
- Universitas/Perguruan Tinggi :
7. Keanggotaan Asosiasi : Nomor :
- Berlaku s.d. : - -
- tgl bln thn
8. Surat Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap KJPP : Nomor :
- Tanggal : - -

IV. Informasi Kantor Perwakilan

1. Alamat Kantor Perwakilan :
- RT/RW : /
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- Provinsi :
- Kode Pos :
2. Telepon : -
3. Faksimile : -
4. Status Kantor : ☐ Milik sendiri ☐ Sewa Luas : m²
5. Jumlah Kantor Perwakilan ke :

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-5-

V. Informasi Pegawai Kantor Perwakilan

1. Jumlah Pegawai : orang
2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pendidikan penilaian : orang

Pemimpin/Pemimpin Rekan*),
KJPP.....

(.....)
Nomor Izin:

*) Coret yang tidak sesuai.

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- ☐ Surat Pengantar (Lampiran VIII.A)
- ☐ Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran VIII.C)
- ☐ Fotokopi surat izin usaha KJPP
- ☐ Fotokopi KTP penanggung jawab Kantor Perwakilan
- ☐ Fotokopi KTP pegawai Kantor Perwakilan
- ☐ Fotokopi ijazah D-III atau setara penanggung jawab Kantor Perwakilan
- ☐ Fotokopi tanda bukti kelulusan pendidikan penilaian tingkat dasar penanggung jawab Kantor Perwakilan
- ☐ Fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai penanggung jawab Kantor Perwakilan
- ☐ Surat pengangkatan penanggung jawab Kantor Perwakilan sebagai pegawai tetap KJPP
- ☐ Surat pengangkatan pegawai Kantor Perwakilan sebagai pegawai tetap KJPP
- ☐ Surat persetujuan pembukaan Kantor Perwakilan yang ditandatangani seluruh Rekan KJPP
- ☐ Fotokopi Tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan Kantor Perwakilan
- ☐ Fotokopi Tanda bukti domisili usaha Kantor Perwakilan
- ☐ Foto tampak depan dan ruangan Kantor Perwakilan
- ☐ 1 (satu) lembar foto 4x6 penanggung jawab Kantor Perwakilan, berwarna dan berlatar belakang merah

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

[Kop Surat KJPP]

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembukaan Kantor Perwakilan KJPP di adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk menutup Kantor Perwakilan dan mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin/Pemimpin Rekan *)
KJPP

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAKAM PU. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



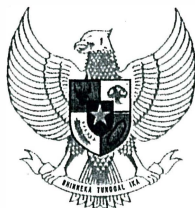
LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERMOHONAN PENUTUPAN KJPP

- A. Surat Permohonan Penutupan KJPP.
- B. Formulir Permohonan Penutupan KJPP.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Penutupan KJPP

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penutupan KJPP

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan penutupan KJPP

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

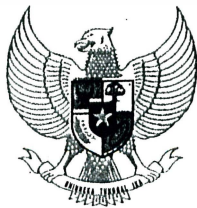
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin/Pemimpin Rekan *),
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

B. Formulir Permohonan Penutupan KJPP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN KJPP	
I. Informasi Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP	
1. Nama Lengkap	:
2. Alamat Tempat Tinggal	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
3. Izin Penilai Publik	: Nomor : . .
	KMK No. :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn
II. Informasi KJPP	
1. Nama KJPP	:
2. Alamat KJPP	:
	RT/RW : /
	Kelurahan :
	Kecamatan :
	Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
3. Telepon	: -
4. Faksimile	: -
5. Izin Usaha KJPP	: . .
	KMK No. :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

6. Bentuk Badan Usaha KJPP	:	☐ Perseorangan	☐ Persekutuan Perdata	☐ Firma
7. Surat pernyataan penutupan KJPP	:	Nomor	:	
		Tanggal	:	- -
				tgl bln thn
8. Surat penyelesaian perikatan profesional KJPP dengan klien	:	Nomor	:	
		Tanggal	:	- -
				tgl bln thn
9. Jumlah Cabang KJPP	:		Kantor	
10. Jumlah Kantor Perwakilan	:		Kantor	

Pemimpin / Pemimpin Rekan*)
KJPP.....

(.....)
Nomor Izin:

*) Coret yang tidak sesuai.

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- ☐ Surat Pengantar (Lampiran IX.A)
- ☐ Surat pernyataan penutupan KJPP yang ditandatangani Pemimpin KJPP bagi KJPP Perseorangan
- ☐ Surat pernyataan penutupan KJPP yang ditandatangani seluruh Rekan KJPP bagi KJPP persekutuan perdata atau firma
- ☐ Surat pernyataan tentang penyelesaian perikatan antara KJPP dengan kliennya yang ditandatangani Pemimpin KJPP bagi KJPP Perseorangan
- ☐ Surat pernyataan tentang penyelesaian perikatan antara KJPP dengan kliennya yang ditandatangani seluruh Rekan KJPP bagi KJPP persekutuan perdata atau firma
- ☐ Asli surat izin usaha KJPP
- ☐ Asli surat izin pembukaan Cabang KJPP dan surat persetujuan pembukaan Kantor Perwakilan jika ada
- ☐ Laporan tahunan KJPP dalam bentuk tercetak (*hard copy*) dan sistem aplikasi (*soft copy*)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 1959042019840210001



h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

PERMOHONAN PENUTUPAN CABANG KJPP

- A. Surat Permohonan Penutupan Cabang KJPP.
- B. Formulir Permohonan Penutupan Cabang KJPP.

Handwritten signature or mark.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Penutupan Cabang KJPP

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penutupan Cabang KJPP

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai
.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan penutupan Cabang KJPP di provinsi

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin Rekan,
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Izin Pembukaan Cabang KJPP	:	KMK No.	:	
		Tanggal	:	- -
				tgl bln thn
5. Surat penutupan Cabang KJPP	:	Nomor	:	
		Tanggal	:	- -
				tgl bln thn
6. Surat penyelesaian perikatan profesional Cabang KJPP dengan kliennya	:	Nomor	:	
		Tanggal	:	- -
				tgl bln thn

Pemimpin Rekan,
KJPP.....

(.....)
Nomor Izin:

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- ☐ Surat Permohonan (Lampiran X.A)
- ☐ Surat pernyataan yang ditandatangani seluruh Rekan KJPP tentang penutupan cabang KJPP
- ☐ Surat pernyataan yang ditandatangani seluruh Rekan KJPP mengenai penyelesaian perikatan profesional antara Cabang KJPP dengan kliennya
- ☐ Asli surat izin Pembukaan Cabang KJPP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

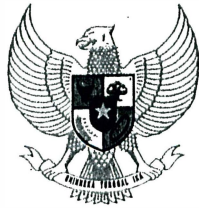
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



b

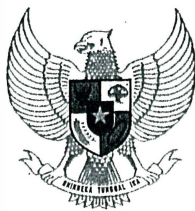


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

PERMOHONAN PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN

- A. Surat Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan.
- B. Formulir Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

A. Surat Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan

Yth. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa
Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan penutupan Kantor Perwakilan KJPP di

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

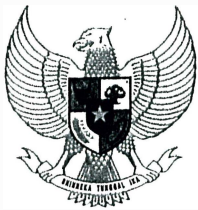
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin/Pemimpin Rekan*),
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

B. Formulir Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI FORMULIR PERMOHONAN PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN		
I. Informasi Penanggung Jawab Kantor Perwakilan		
1. Nama Lengkap	:	
2. Alamat Tempat Tinggal	:	
RT/RW	: /	
Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kota	:	
Provinsi	:	
Kode Pos	:	
II. Informasi KJPP		
1. Nama KJPP	:	
2. Izin Usaha KJPP	: . .	
KMK No.	:	
Tanggal	: - -	
tgl	bln	thn
III. Informasi Kantor Perwakilan yang Ditutup		
1. Alamat Kantor Perwakilan	:	
RT/RW	: /	
Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Kota	:	
Provinsi	:	
Kode Pos	:	
2. Telepon	: -	
3. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Perwakilan	: Nomor :	
Tanggal	: - -	
tgl	bln	thn

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

4. Surat Persetujuan Penutupan Kantor Perwakilan

: Nomor

:

: - -

tgl

bln

thn

Pemimpin/ Pemimpin Rekan*)
KJPP.....

(.....)

Nomor Izin:

*) Coret yang tidak sesuai.

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

Surat Pengantar (Lampiran XI.A)

Asli surat persetujuan pembukaan Kantor Perwakilan

Surat persetujuan penutupan Kantor Perwakilan yang ditandatangani seluruh rekan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u. l.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001



10



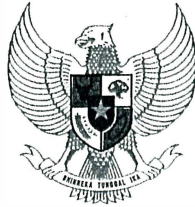
LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERMOHONAN PERSETUJUAN KERJASAMA DENGAN KJPPA

- A. Surat Permohonan Persetujuan Kerjasama dengan KJPPA.
- B. Formulir Permohonan Persetujuan Kerja Sama dengan KJPPA.
- C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Permohonan Persetujuan Kerja Sama dengan KJPPA

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Kerja Sama dengan KJPPA

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan melakukan kerja sama di bidang jasa Penilaian dengan KJPPA

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Permohonan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

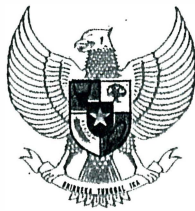
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin/Pemimpin Rekan*),
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

4. Rencana Program
(Bidang Penilaian dan/ atau
Jasa Lainnya)

: a. Bantuan Teknis

NO	Jenis Kegiatan	Objek	Lokasi
1			
2			

b. Alih Pengetahuan

NO	Topik	Tempat	SKP
1			
2			

Pemimpin/Pemimpin Rekan*)
KJPP

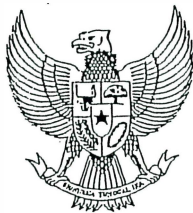
(.....)
Nomor Izin:

*) Coret yang tidak sesuai.

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

- ☐ Surat Pengantar (Lampiran XII.A)
- ☐ Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran XII.C)
- ☐ Profil KJPPA
- ☐ Fotokopi perjanjian kerja sama KJPP dengan KJPPA yang disahkan Notaris

3



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

[Kop Surat KJPP]

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan persetujuan melakukan kerja sama di bidang jasa Penilaian dengan KJPPA adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenai pembatalan persetujuan melakukan kerja sama di bidang jasa Penilaian dengan KJPPA dan mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,
Pemimpin/Pemimpin Rekan *)
KJPP

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten mark



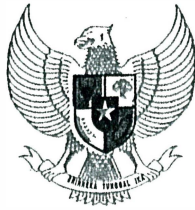
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

LAPORAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DENGAN KJPPA

- A. Surat Laporan Berakhirnya Kerja Sama dengan KJPPA.
- B. Formulir Laporan Berakhirnya Kerja Sama dengan KJPPA.

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

A. Surat Laporan Berakhirnya Kerja Sama dengan KJPPA

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Berakhirnya Kerja Sama dengan KJPPA

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengajukan laporan berakhirnya kerja sama dengan KJPPA

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Laporan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin/Pemimpin Rekan*),
KJPP.....

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

[Handwritten signature]



B. Formulir Laporan Berakhirnya Kerja Sama dengan KJPPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI LAPORAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DENGAN KJPPA	
I. Informasi KJPP	
1. Nama KJPP	: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table>
2. Alamat KJPP	: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> RT/RW : <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> / <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Kelurahan : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Kecamatan : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Kota : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Provinsi : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Kode Pos : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> 3. Izin Usaha KJPP : <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> . <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> KMK : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Tanggal : <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> - <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> - <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> tgl bln thn
II. Informasi Kerja Sama dengan KJPPA	
1. Nama KJPPA	: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table>
2. Alamat	: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Kota : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Negara : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table>
3. Surat Persetujuan Kerja Sama	: Nomor : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Tanggal : <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> - <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> - <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> tgl bln thn Pemimpin/Pemimpin Rekan*) KJPP (.....) Nomor Izin:
*) Coret yang tidak sesuai.	
Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini : <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Surat Permohonan (Lampiran XIII.A) <table border="1" style="display: inline-table; width: 10%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></table> Fotokopi dokumen yang membuktikan berakhirnya kerja sama	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201981021001



LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI PPL TAHUNAN

- A. Surat Laporan Realisasi PPL Tahunan.
- B. Daftar Laporan Realisasi PPL.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

A. Surat Laporan Realisasi PPL Tahunan

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Realisasi PPL Tahun

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyampaikan laporan realisasi PPL Tahun

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Daftar Laporan Realisasi PPL yang telah dilengkapi beserta fotokopi Sertifikat PPL yang telah diikuti.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

(.....)
Nomor Izin:

2



B. Daftar Laporan Realisasi PPL

Nama Penilai Publik :
 Nomor Izin Penilai Publik :
 Klasifikasi Izin Penilai Publik :
 Nama KJPP :

Penilai Publik,

Laporan Realisasi PPL wajib dilampirkan dengan fotokopi Sertifikat PPL.

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

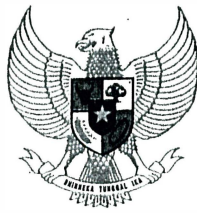
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

LAPORAN PERUBAHAN ALAMAT ATAU DOMISILI PENILAI PUBLIK

- A. Surat Laporan Perubahan Alamat atau Domisili Penilai Publik.
- B. Formulir Laporan Perubahan Alamat atau Domisili Penilai Publik.
- C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Laporan Perubahan Alamat atau Domisili Penilai Publik

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Perubahan Alamat/Perubahan Domisili
Penilai Publik*)

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan perubahan alamat/perubahan domisili*) Penilai Publik.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Laporan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Penilai Publik,

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

III. Perubahan Alamat dan Domisili KJPP*)

Disi jika Penilai Publik yang menjadi Pemimpin/Pemimpin Rekan melakukan perubahan domisili

1. Nama KJPP :

2. Izin Usaha KJPP : . .
KMK No. :
Tanggal : - -
tgl bln thn

3. Alamat Sebelumnya :

RT/RW : /
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :
Kode Pos :
Telepon : -
Faksimile : -
4. Alamat Baru :

RT/RW : /
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :
Kode Pos :
Telepon : -
Faksimile : -

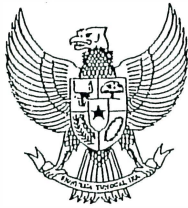
Penilai Publik/Pemimpin/
Pemimpin Rekan*)

(.....)
Nomor Izin:

*) Coret yang tidak sesuai.

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :
Perubahan Alamat dan/atau Domisili Penilai Publik:

- ☐ Surat Pengantar (Lampiran XV.A)
☐ Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran XV.C)
☐ Fotokopi bukti domisili Penilai Publik yang baru



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam laporan perubahan alamat/perubahan domisili*) Penilai Publik adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Yang membuat pernyataan,
Penilai Publik

(meterai Rp 6.000,-)

(.....)
Nomor Izin:

* Coret yang tidak sesuai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984001001





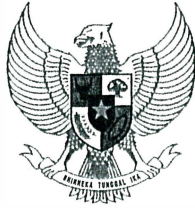
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

LAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KJPP ATAU CABANG KJPP, SUSUNAN REKAN,
PEMIMPIN REKAN ATAU PEMIMPIN CABANG

- A. Surat Laporan Perubahan Alamat KJPP atau Cabang KJPP, Susunan Rekan, Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang.
- B. Formulir Laporan Perubahan Alamat KJPP, Susunan Rekan, atau Pemimpin Rekan.
- C. Formulir Laporan Perubahan Alamat Cabang KJPP atau Pemimpin Cabang.

Handwritten signature or mark.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

A. Surat Laporan Perubahan Alamat KJPP atau Cabang KJPP, Susunan Rekan, Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Perubahan Alamat KJPP atau Cabang KJPP, Susunan Rekan, Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang

Yth. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

.....

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan laporan perubahan alamat KJPP/perubahan alamat Cabang KJPP/perubahan susunan Rekan KJPP/perubahan Pemimpin Rekan KJPP/perubahan Pemimpin Cabang KJPP. *)

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Laporan yang telah dilengkapi beserta kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

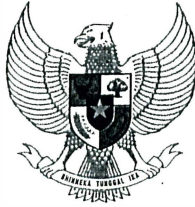
Pemimpin/Pemimpin Rekan*),
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

J

(.....)
Nomor Izin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

Perubahan Alamat KJPP:

- ☐ Surat Permohonan (Lampiran XVI.A)
- ☐ Fotokopi bukti kepemilikan atau sewa kantor
- ☐ Fotokopi surat keterangan domisili
- ☐ Denah kantor yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain
- ☐ Foto kantor tampak depan dan foto ruangan KJPP yang baru

Perubahan Susunan Rekan KJPP:

- ☐ Surat Permohonan (Lampiran XVI.A)
- ☐ Fotokopi perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris
- ☐ Fotokopi izin Penilai Publik yang menjadi Rekan
- ☐ Surat pengunduran diri dari KJPP untuk Penilai Publik yang mengundurkan diri

Perubahan Pemimpin Rekan KJPP:

- ☐ Surat Permohonan (Lampiran XVI.A)
- ☐ Surat persetujuan dari seluruh rekan mengenai perubahan Pemimpin Rekan KJPP
- ☐ Surat persetujuan seluruh Rekan KJPP mengenai penunjukan Pemimpin Rekan KJPP
- ☐ Fotokopi bukti domisili Pemimpin Rekan KJPP yang baru



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

C. Formulir Laporan Perubahan Alamat Cabang KJPP atau Pemimpin Cabang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI	
LAPORAN PERUBAHAN: ☐ Alamat Cabang KJPP ☐ Pemimpin Cabang KJPP	
I. Informasi KJPP	
1. Nama KJPP	:
2. Izin Usaha KJPP	: . .
KMK No.	:
Tanggal	: - -
	tgl bln thn
II. Perubahan Alamat Cabang KJPP	
1. Alamat Sebelumnya	:
RT/RW	: /
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kota	:
Kode Pos	:
Telepon	: -
Faksimile	: -
E-mail	:
2. Alamat Baru	:
RT/RW	: /
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kota	:
Kode Pos	:
Telepon	: -
Faksimile	: -
E-mail	:
III. Perubahan Pemimpin Cabang	
1. Pemimpin Cabang Sebelumnya	:
Izin Penilai Publik	: Nomor : . .
	KMK No. :
	Tanggal : - -
	tgl bln thn



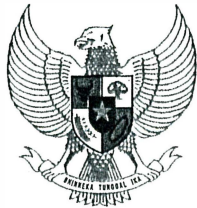
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101/PMK.01/2014
TENTANG PENILAI PUBLIK

LAPORAN TAHUNAN KJPP

- A. Surat Laporan Tahunan KJPP.
- B. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi.
- C. Formulir Laporan Tahunan KJPP.
- D. Lampiran Laporan Tahunan.

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2-

A. Surat Laporan Tahunan KJPP

[Kop Surat KJPP]

.....,

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Tahunan KJPP Tahun

Yth. Sekretaris Jenderal,
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan
Jasa Penilai

.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan KJPP, yang terdiri dari laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, dan laporan realisasi penggunaan dan alih pengetahuan tenaga ahli asing, untuk tahun

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Formulir Laporan Tahunan yang telah dilengkapi beserta sistem aplikasi Laporan Tahunan dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

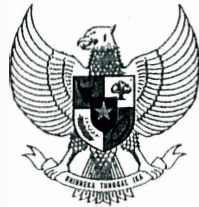
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemimpin/Pemimpin Rekan*)
KJPP

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

3



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3-

B. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

[Kop Surat KJPP]

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA DAN INFORMASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan, bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan KJPP untuk tahun..... adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Yang membuat pernyataan,

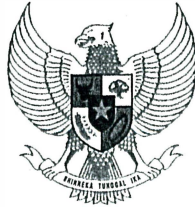
Pemimpin / Pemimpin Rekan *)
KJPP

(meterai Rp6.000,-)

(.....)
Nomor Izin:

*) coret yang tidak sesuai.

2

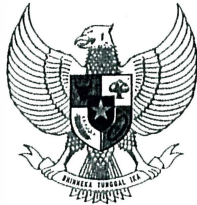


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4-

C. Formulir Laporan Tahunan KJPP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI LAPORAN TAHUNAN KJPP..... TAHUN	
I. Informasi KJPP	
1. Nama KJPP	:
2. Bentuk Badan Usaha	: ☐ Perseorangan ☐ Persekutuan ☐ Firma
3. Alamat	: RT/RW : / Kelurahan : Kecamatan : Kota : Provinsi : Kode Pos :
4. Telepon	: -
5. Faksimile	: -
6. Email	:
7. Website	:
8. Izin Usaha KJPP	: ☐ . ☐ . KMK No. : Tanggal : - - tgl bln thn
9. Bidang Jasa	: ☐ Properti Sederhana ☐ Properti ☐ Bisnis ☐ Properti&Bisnis
10. Wilayah Kerja	:
11. NPWP KJPP	: . . . - .
12. Status Kantor	: ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa Luas: m ²
II. Informasi Pemimpin/Pemimpin Rekan KJPP	
1. Nama Lengkap (tanpa gelar)	:
2. Alamat Tempat Tinggal	: RT/RW : / Kelurahan : Kecamatan : Kota : Provinsi : Kode Pos :
3. Telepon/Handphone	: -
4. Menjabat sebagai Pemimpin /Pemimpin Rekan sejak	: - - tgl bln thn
5. Izin Penilai Publik	: Nomor : . . KMK No. : Tanggal : - - tgl bln thn



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

III. Informasi Rekan KJPP *)

1. Akta Perjanjian Kerjasama : Nomor :
Tanggal : - -
tgl bln thn
2. Jumlah Rekan : Penilai Publik Non Penilai Publik
 laki-laki perempuan

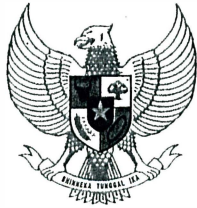
*) Diisi oleh KJPP berbentuk usaha Persekutuan sesuai dengan Lampiran XVII.D.01, apabila jumlah Rekan lebih dari satu.

IV. Informasi Cabang KJPP **)

1. Jumlah Cabang KJPP : kantor
- Alamat Cabang KJPP :
RT/RW : /
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :
Kode Pos :
Telepon : -
Faksimile : -
Izin Pembukaan Cabang : KMK No. :
Tanggal : - -
tgl bln thn
- Status Kantor : ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa Luas m²
2. Pemimpin Cabang KJPP
- Nama Lengkap (tanpa gelar) :
Menjabat Sebagai Pemimpin : - -
Cabang Sejak tgl bln thn
Izin Penilai Publik : Nomor : . .
KMK No. :
Tanggal : - -
tgl bln thn

**) Diisi oleh KJPP yang mempunyai Cabang KJPP sesuai dengan Lampiran XVII.D.02, apabila jumlah Cabang KJPP lebih dari satu.

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

VI. Data Tenaga Kerja

Pendidikan		Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Perwakilan	Jumlah
A.	Penilai Publik				
	S-3				
	S-2				
	S-1				
B.	Tenaga Penilai				
	S-3				
	S-2				
	S-1 / D-IV				
	D III				
C.	Tenaga Ahli Asing				
	S-3				
	S-2				
	S-1 / D-IV				
	D III				
D.	Tenaga Ahli Lainnya				
	S-3				
	S-2				
	S-1 / D-IV				
	D III				
E.	Tenaga Administrasi				
	S-2				
	S-1 / D-IV				
	D III				
	D II				
	D I				
	SLTA				

VII. Laporan Kegiatan Usaha

1. Jumlah Keseluruhan Klien :

KJPP Pusat

Cabang KJPP

Kantor Perwakilan

2. Jumlah Klien menurut
Kepemilikan

: Swasta

KJPP

Cabang

Perwakilan

Total

BUMN

BUMD

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Koperasi

3. Jumlah Klien menurut
Status

: Go Publik

: Non Go Publik

4. Jumlah Klien Menurut
Bidang Jasa Penilaian

: Penilaian Properti Sederhana

Tanah kosong

Apartemen

Rumah tinggal

Rumah toko

Rumah kantor

Kios

Peralatan dan Perlengkapan

Mesin individual

Transportasi non angkutan

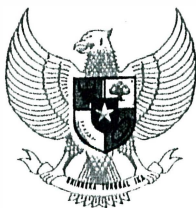


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

		Penilaian Properti				
		Tanah dan Bangunan				
		Mesin dan Peralatan				
		Alat transportasi				
		Alat berat				
		Alat komunikasi				
		Alat kesehatan				
		Alat laboratorium & utilitas				
		Peralatan & Perabotan Kantor				
		Peralatan Militer				
		Perangkat Telekomunikasi				
		Pertanian				
		Perkebunan				
		Peternakan				
		Perikanan				
		Kehutanan				
		Pertambangan				
		Penilaian Bisnis				
		Entitas bisnis				
		Penyertaan				
		Surat Berharga				
		Hak & Kewajiban				
		Aset Tak Berwujud				
		Kerugian Ekonomis				
		Opini Kewajaran				
		Instrumen Keuangan				
5. Jumlah Klien Menurut	:	Konsultasi Pengembangan				
Jasa Lainnya		Properti				
		Desain Sistem Informasi Aset				
		Manajemen Properti				
		Studi Kelayakan Usaha				
		Jasa Agen Properti				
		Pengawasan Pembiayaan				
		Proyek				
		Penasehat keuangan				
		korporasi				
		Studi sisa umur ekonomi				
		Studi HBU				
		Studi Optimalisasi Aset				
		Lainnya (sebutkan)				
Bidang Usaha	:	Manufaktur				
		Konstruksi				
		Lembaga Keuangan :				
		- Perbankan				
		- Asuransi				
		- Dana Pensiun				
		- Jasa Pembiayaan				

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Hotel & Pariwisata				
Perdagangan				
Pertanian, perkebunan, Kehutanan & Peternakan				
Pertambangan & Energi				
Transportasi				
Pos & Telekomunikasi				
Infrastruktur				
Kesehatan				
Pendidikan				
Lainnya (sebutkan)				

VIII. Kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA)

1. Nama KJPPA :

Alamat di Luar Negeri :

(Kantor Pusat)

Telepon : -

Faksimile : -

Email :

Website :

2. Nama KJPP dicantumkan : ☐ Ya ☐ Tidak
bersama dengan nama KJPPA

3. Surat Persetujuan Pembukaan : Nomor :

Tanggal : - -

tgl bln thn

Pemimpin / Pemimpin Rekan*)
KJPP.....

(.....)

*) Coret yang tidak sesuai. Nomor Izin:

Dokumen pendukung yang harus disampaikan beserta formulir ini :

☐ Surat Laporan Tahunan KJPP (Lampiran XVII.A)

☐ Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi (Lampiran XVII.B)

☐ Lampiran Laporan Tahunan (Lampiran XVII.D.01-XVII.D.13)

h



Lampiran XVII.D.04

4



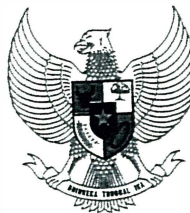
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15-

Lampiran XVII.D.06

DAFTAR TENAGA KERJA KJPP TAHUN														
NO.	Nama	Izin Penilai Publik		No. Anggota Asosiasi	Mulai Bekerja	Jabatan	Menjabat Sejak	Bidang Keahlian Penilaian	Jam Kerja Penilaian	Pendidikan Penilaian	Pendidikan Formal Terakhir	Kota Tempat Bekerja		
		Nomor	Tanggal									KJPP	Cabang KJPP	Kantor Perwakilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Penilai Publik													
	a.													
	b.													
	dst.													
II	Penilai													
	a.													
	b.													
	dst.													
III	Tenaga Ahli Asing													
	a.													
	b.													
	dst.													
IV	Tenaga Ahli Lainnya													
	a.													
	b.													
	dst.													
V	Tenaga Administrasi													
	a.													
	b.													
	dst.													

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17-

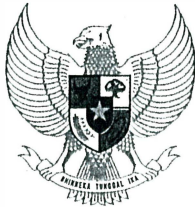
Lampiran XVII.D.08

DAFTAR DATA PEMBANDING LAPORAN PENILAIAN													
KJPP													
TAHUN													
No	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian		Data Pembanding										
	Nomor	Tanggal	Jenis Data	Properti		Mesin			Lokasi	Harga		Tahun Data	Sumber Data
				Luas Tanah	Luas Bangunan	Merk	Kapasitas	Tahun Pembuatan		Transaksi	Penawaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			1										
			2										
			3										
2			1										
			2										
			3										
Data Pembanding sekurang-kurangnya 3 (tiga) data untuk 1 (satu) Objek Penilaian													



Lampiran XVII.D.09





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

Lampiran XVII.D.11

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)

NERACA
31 DESEMBER 20xx DAN 20x1
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Catatan	31 Desember 20xx	31 Desember 20x1
ASET LANCAR		
Kas dan Setara kas	xxx	xxx
Piutang Usaha:		
- Pihak Ketiga	xxx	xxx
- Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	xxx	xxx
Piutang Lain-lain	xxx	xxx
Pajak Dibayar di Muka	xxx	xxx
Uang Muka	xxx	xxx
Biaya Dibayar di Muka	xxx	xxx
..... (tambah sesuai kebutuhan)	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxxx	xxxx
ASET TIDAK LANCAR	xxx	xxx
Aset Tetap	xxx	xxx
Akumulasi depresiasi	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx
..... (tambah sesuai kebutuhan)	xxx	xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
Jumlah Aset	xxxxx	xxxxx
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS LANCAR		
Hutang usaha	xxx	xxx
Biaya yang masih harus dibayar	xxx	xxx
Hutang pajak	xxx	xxx
Hutang lain-lain	xxx	xxx
..... (tambah sesuai kebutuhan)	xxx	xxx
Jumlah - Liabilitas lancar	xxx	xxx
LIABILITAS TIDAK LANCAR		
Liabilitas imbalan kerja	xxx	xxx
..... (tambah sesuai kebutuhan)	xxx	xxx
Jumlah - Liabilitas tidak lancar	xxx	xxx
Jumlah - Liabilitas	xxxx	xxxx
EKUITAS		
Modal saham	xxx	xxx
Saldo Laba	xxx	xxx
Laba (rugi) tahun berjalan	xxx	xxx
..... (tambah sesuai kebutuhan)	xxx	xxx
Jumlah - Ekuitas	xxxx	xxxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	xxxxx	xxxxx

Catatan :
Dalam hal KJPP mempunyai cabang, maka Laporan Keuangannya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan KJPP.

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

Lampiran XVII.D.12

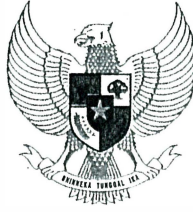
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 20xx DAN 20x1
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Catatan	31 Desember 20xx	31 Desember 20x1
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Penilaian	xxx	xxx
Pendapatan Jasa Non Penilaian	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan	xxxx	xxxx
BEBAN POKOK PENJUALAN		
Biaya Langsung	xxx	xxx
Biaya Tidak Langsung	xxx	xxx
Jumlah Beban Pokok Penjualan	xxxx	xxxx
LABA KOTOR	xxxx	xxxx
BEBAN USAHA		
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
Beban Administrasi	xxx	xxx
Beban Umum	xxx	xxx
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	xxxx	xxxx
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan lain-lain		
Pendapatan Bunga	xxx	xxx
..... (tambah sesuai kebutuhan)	xxx	xxx
Beban lain-lain		
Beban Bunga	xxx	xxx
..... (tambah sesuai kebutuhan)	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	xxxx	xxxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	xxxxx	xxxxx
Taksiran Manfaat (Beban) pajak penghasilan		
Beban pajak	xxx	xxx
Pajak Tangguhan	xxx	xxx
LABA (RUGI) - BERSIH SETELAH PAJAK	xxxxx	xxxxx

Catatan :
Dalam hal KJPP mempunyai cabang, maka Laporan Keuangannya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan KJPP.

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

Lampiran XVII.D.13

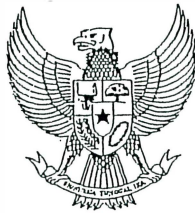
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)

.....

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per Tanggal 31 Desember 20xx
(Sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya)

- A. Umum
- KJPP xxx didirikan berdasarkan akta notaris dan/atau izin Menteri Keuangan nomor.....tanggal dengan bidang jasa antara lain.....dan seterusnya
- B. Kebijakan Akuntansi
- Ikhtisar kebijakan akuntansi utama yang dianut oleh KJPP adalah sebagai berikut :
- Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
 - Periode Akuntansi
 - Pengakuan Pendapatan
 - Pembayaran Pajak-pajak
 - ... dan seterusnya
- C. Penjelasan Catatan Laporan Keuangan
- Kas dan Setara Kas, terdiri dari:
 - Kas kecil sebesar Rp. ...
 - Bank X sebesar Rp. dan seterusnya.
 - Piutang Usaha, terdiri dari:
 - Pihak ketiga sebesar Rp. ...
 - Pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp. dan seterusnya
 - Asset Tetap terdiri dari:
 - Utang Usaha, terdiri dari:
 - Utang pajak, terdiri dari:
 - Liabilitas imbalan kerja, terdiri dari:
 - Modal
 - Setoran modal dari pemilik terdiri dari setoran rekan Penilai Publik sebesar, dan setoran rekan yang bukan penilai publik sebesar Dalam tahun berjalan, terjadi penarikan modal (prive) dari rekan penilai publik sebesar dan rekan yang bukan penilai publik sebesar.....
 - Pendapatan Jasa
- Pendapatan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan gabungan antara Kantor Pusat, Cabang dan Perwakilan.
- Pendapatan Kantor Jasa Penilai Publik diperoleh dari :
- Pendapatan Jasa Penilaian (sesuaikan dengan klasifikasi izin Penilai Publik di KJPP) yang terdiri dari:
 - pendapatan jasa penilaian properti; dan/atau
 - pendapatan jasa penilaian bisnis.
 - Pendapatan Jasa Non Penilaian yang terdiri dari:
 - Pengawasan Pembiayaan Proyek;
 - Studi Kelayakan Usaha;
 - ...dan seterusnya (sesuaikan dengan jasa lain yang diberikan KJPP kepada pemberi tugas).
- Beban Operasi
- Beban Operasi KJPP terdiri dari gaji rekan Penilai Publik sebesar, gaji tenaga penilai sebesar, gaji tenaga ahli lainnya, gaji tenaga administrasi, gaji tenaga asing,dan biaya perjalanan dinas rekan sebesar serta biaya perjalanan dinas tenaga penilai sebesar dan seterusnya.

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

11. Beban administrasi dan umum
Di dalam beban administrasi dan umum, termasuk biaya di dalamnya, biaya royalti atau pun fee sebagai konsekuensi dilakukan kerjasama dengan Kantor Jasa Penilai Publik asing.
12. Pajak Penghasilan Badan
Sebesar ... merupakan taksiran pajak yang harus dibayar pada tahun berjalan yang dihasilkan dari pendapatan pemberian jasa penilaian dan jasa lainnya setelah dikurangi beban operasi dan beban administrasi dan umum.
... dan seterusnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



h

